

**BUDAYA POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN PERMATA
KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2017**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUSLIM

NIM : 140801001

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY

DARUSALAM-BANDA ACEH

2018 M/1439 H

ABSTRAK

PemilukadaKabupaten Bener Meneriah di KecamatanPermatadiikuti oleh 7 PasanganCalon (Paslon) denganjumlahpemilih11.410 Suaraorang denganjumlahsuarahsebanyak9.495 suaradanjumlahsuara yang tidaksahsebanyak386 Suara. Sedangkanmasyarakat yang tidakmenggunakanhakpilih (golput) sebanyak1.578 orang.Dengandemikianmakatingkatpartisipasisipemilih diKecamatanPermatamencapai 81.3 % danangkainimenunjukkanbahwatingkatpartisipasisipemilihmelebihi target yang ditepkan KIP Aceh yaitusebesar 75 persen.Hal inimenunjukkanbahwaKecamatanPermatamerupakansalahasatukecamatan denganpartisipasisipolitikmasyarakat yang tinggidalamPemilukadaKabupatenBenerMeriah.Penelitian ini bertujuan untukmengetahuibudayapolitikmasyarakatkecamatanPermataKabupatenBenerMeriahdalam pemilihankepaladaerahtahun 2017 danuntukmengetahuiperlakumemilihpadamasyarakatkecamatanPermataKabupatenBenerMeriahdalam pemilihankepaladaerahtahun2017. Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatifdenganmetodepenelitiandeskriptifanalitis.HasilpenelitianmenunjukkanbahwabudayapolitikmasyarakatkecamatanPermataKabupatenBenerMeriahdalamPemilikadatahun 2017 mempunyaicirikhasbudayapolitikpartisipandenganmenunjukkanpartisipasisipolitik yang tinggi.PerlakumemilihpadamasyarakatkecamatanPermatadalampemilihankepaladaerahtahun 2017 dipengaruhioleh tiga aspek yaituaspek sosiologis, psikologis danrasional.Perlakumemilih dari aspek sosiologis dapat dilihat dari sebagian besarmasyarakatmemilih kandidatPaslonberdasarkan pendidikan, keagamaandan kesukuan.Dari aspek psikologis yaitumasyarakatmasih tergingoleh politik pencitraan, loyalitas dan faktor kedekatan emosional dengan partai politik atau Paslon.Dari aspek rasional yaitupemilih mempertimbangkan visi dan misi paracalon, kampanye, komitmen, prestasi, integritas dan keperibadian Paslon.

Kata kunci: Budaya politik, Masyarakat, Pemilukada

SURAT KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muslim

Nim : 140801001

Jenjang : stars satu (S I)

Jurusan/prodi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya ilmiah saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh 31 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Muslim

Nim: 140801001

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Poitik

Diajukan Oleh:

MUSLIM

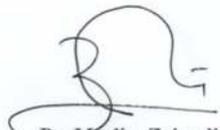
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

NIM: 140801001

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muslim Zainudin M. Si
Nip: 196610231994021001

Pembimbing II



Eka Januar M. Soc.Sc
Nip: 198401012015031003

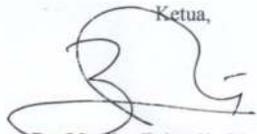
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Serta
Dalam Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 31 Agustus 2018 M
19 Dzulhijah H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Muslim Zainudin M. Si
NIP. 196610231994021001

Sekretaris



Eka Januar M, Soc.Sc
NIP. 198401012015031003

Penguji I



Dr. Mahmuddin, M. Si
NIP. 197210201997031002

Penguji II



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.



Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum
NIP. 19730723200032002

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017”**. Tidak lupa pula penulis junjungkan selawat beserta salam kepada pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, karna berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan juga memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini, penulis menyampaikan dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
3. Dr. Abdullah Sani., Lc. M. A. selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Eka Januar., M. Sos. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si. selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran, dan juga motivasi, serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Eka Januar., M. Sos. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, arahan dan kesabarannya dalam membimbing penulis.

7. Seluruh dosen ilmu politik yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Dan kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan mahasiswa ilmu politik yang tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu yang memberikan arahan, semangat, dan juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berliat ganda kepada semuanya. Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka penulis memohon saran dan juga keritikan yang bersipat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 31 Agustus 2018

MUSLIM

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakangMasalah	1
1.2 RumusanMasalah.....	5
1.3 TujuanPenelitian.....	6
1.4 ManfaatPenelitian.....	6
BAB IILANDASAN KONSEPTUAL BUDAYA POLITIK	
2.1 PeneltianTerdahulu	7
2.2 Pemilukada	10
2.3 BudayaPolitik	15
2.4 BudayaPolitikBerdasarkanSikap	17
2.5 BudayaPolitikBerdasarkanOrientasiPolitik	18
2.6 PerilakuMemilih	21
BAB IIMETODE PENELITIAN	
3.1 JenisPenelitian	25
3.2 LokasiPenelitian	25
3.3 SubjekPenelitian	26
3.4 TeknikPengumpulan Data	27
3.5 TeknikAnalisis Data	38
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 GambaranUmumObjekPenelitian.....	30
4.2 HasilPenelitian.....	32
4.2.1 BudayapolitikmasyarakatkecamatanPermata KabupatenBenerMeriahdalampemilihan kepaladaerahtahun 2017	35
4.2.1.1 AlasanMasyarakatKecamatanPermata KabupatenBenerMeriahMenggunakanHak PilihDalamPemilukada 2017	35
4.2.1.2 Faktor-Faktor Yang MempengaruhiMasyarakatKecamatanPermataDalamMemilih	
4.2.1.3 Salah SatuPaslonPadaPemilukada 2017	37
4.2.1.4 OrientasiBudayaPolitikKognitifPada MasyarakatKecamatanPermataDalam Pemilukada 2017	38
4.2.1.5 OrientasiBudayaPolitikAfektifPada MasyarakatKecamatanPermataDalam Pemilukada 2017	41
4.2.1.6 OrientasiBudayaPolitikEvaluatifPada	

	MasyarakatKecamatanPermataDalam PemilukadaTahun 2017	47
4.2.2	Perilakumemilihpadamasyarakatkecamatan PermataKabupatenBenerMeriahdalam pemilihan kepaladaerahtahun 2017	51
4.2.2.1	PerilakuMemilihMasyarakatKecamatan PermataPemilukadaTahun 2017 BerdasarkanPendekatanSosiologis	52
4.2.2.2	PerilakuMemilihMasyarakatKecamatan PermataPemilukadaTahun 2017 BerdasarkanPendekatanPsikologis	53
4.2.2.3	PerilakuMemilihMasyarakatKecamatan PermataPemilukadaTahun 2017 BerdasarkanPendekatanRasional	57
4.3	Pembahasan	60

BAB IV PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung merupakan cara untuk memilih wakil rakyat yang ada di daerah secara demokratis. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu langkah maju dalam proses demokratisasi di Indonesia. Pemilukada sebagai pelaksana kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam menjamin pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan dengan demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 makalah kedaulatan rakyat sertademokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, dan perilaku masyarakat yang berupa partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Masyarakat dalam melakukan kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi, kehidupan pribadi, dan sosial secara luas.¹

¹A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 4.

Budaya politik dapat secara langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. Budaya politik juga terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatarbelakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi. Sehingga, orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak mereka melakukan pemberian suara, dengan cara ikut serta berpartisipasi secara langsung untuk memilih wakil rakyat di daerahnya dalam pemilihan umum kepala daerah.²

Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah pedalaman di Aceh yang juga ambil bagian dalam ajang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah setempat pada tanggal 15 Februari 2017. Pemilu kada di Kabupaten Bener Meriah diikuti oleh 7 Pasangan Calon (Paslon) dengan jumlah pemilih 96.727 orang yang terdiri dari 48.269 pemilih laki-laki dan 48.456 pemilih perempuan. Pemilu kada Bener Meriah dimenangi oleh Paslon nomor urut 3 yaitu Ahmadi, SE dan Tgk. H. Sarkawi yang meraup 29.554 suara (37.88%), diikuti Paslon nomor 5 Drs.H. Rusli M. Saleh dan Drs. H. T. Islah, M. Si yang memperoleh 17.736 suara (22.73%), Paslon nomor 1 Ir.H.Ridwan Abdul Muthalib, MT dan Riduansyah memperoleh 14.804 suara (18.97%), Paslon nomor 6 Drs.Tgk. H. Ridwan Qari dan Ir. Suterisno. M.Ap memperoleh 6.916 suara (8.86%), Paslon nomor 2 H.Misrady, MS dan Nasruddin memperoleh 4.964 suara (6.36%), Paslon nomor 7 Muchlis Gayo dan M.Ali memperoleh 2.599 suara (3.33%), Paslon nomor 4 Armada Saleh dan Karmijan memperoleh 1.447 suara (1.85%).

²Ronaldh H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 267.

Budaya politik tidak terlepas dari perilaku memilih masyarakat. Perilaku memilih masyarakat pada dasarnya saling berkaitan antara budaya politik yang ada di masyarakat, karena perilaku memilih merupakan sikap masyarakat untuk memberikan suara dan menentukan calon siapa yang akan dipilih menjadi bupati dan wakil bupati dalam pemilukada secara langsung. Sehingga, budaya politik yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi perilaku pemilihnya.³

Dalam hal ini, masyarakat akan bersikap rasional, bersikap tidak rasional, bersikap acuh tak acuh atukah masyarakat memang sudah mempunyai kesadaran politik untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih wakil rakyat yang ada didaerahnya ketika diadakan pemilihan umum kepala daerah. Perilaku memilih masyarakat dalam pemilukada merupakan salah satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

Sebagai contoh masyarakat Kecamatan Permata yang juga ikut berpartisipasi dalam pemilukada secara langsung di Kabupaten Kabupaten Bener Meriah untuk memilih bupati dan wakil bupati yang diinginkannya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterlibatan rakyat dalam kegiatan politik. Kecamatan Permata pada dasarnya merupakan wilayah pedalaman Aceh dengan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah karena sebagian besar dari mereka hanya lulusan sekolah dasar. Pengetahuan politik yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Permata juga rendah karena mereka kurang memperhatikan perkembangan politik dan isu-isu

³Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 267.

politik. Hal itu terjadi karena keseharian bekerja di kebun dan ladang dari pagi sampai sore hari bahkan ada yang sampai malam hari.

Dalam struktur masyarakat Kecamatan Permata memang telah dibentuk organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemuda di setiap kampung, organisasi tersebut masih kurang aktif, sehingga organisasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat Kecamatan Permata. Walaupun tidak ada wadah sosial yang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan politik pada masyarakat. Selain itu penyuluhan-penyuluhan politik di Kecamatan Permata bisa dikatakan sangat minim dilaksanakan. Namun tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Permata yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih bupati dan wakil bupati pada Pemilu 2017 tinggi dan melebihi target dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Berdasarkan data dari situs hitung Komisi Pemilihan Umum (KPU), diperoleh bahwa jumlah pemilih di Kecamatan Permata sebanyak 11.410 orang yang terdiri dari 6.605 pemilih laki-laki dan 4.805 pemilih perempuan. Jumlah suara sah sebanyak 9.495 suara dan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 386 suara, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih (golput) sebanyak 1.578 orang. Dengan demikian maka tingkat partisipasi masyarakat pemilih di Kecamatan Permata mencapai 81,3 % dan angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih melebihi target yang ditetapkan KIP Aceh yaitu sebesar 75 persen.⁴

⁴https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/bener_meriah, hlm. 2.

Fenomena di atas merupakan realitas politik yang sangat menarik terjadi pada masyarakat Kecamatan Permata, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam tentang budaya politik masyarakat Kecamatan Permata pada Pemilu Kabupaten Bener Meriah tahun 2017. Asumsi awal penulis bahwa tingginya partisipasi dalam Pemilu bupati dan wakil bupati periode 2017-2022 dapat saja disebabkan oleh adanya budaya politik yang partisipan serta adanya kesadaran politik untuk berperilaku memilih secara logis, secara cerdas, dan secara kritis dengan menggunakan hati nuraninya atau bisa saja akibat dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku memilihnya seperti faktor-faktor sosiologis, psikologis, politik penggiringan massa dan money politik.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan tersebut di atas dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana budaya politik masyarakat kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017?
2. Bagaimana perilaku memilih pada masyarakat kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui budaya politik masyarakat kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017.
2. Untuk mengetahui perilaku memilih pada masyarakat kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu politik khususnya untuk jurusan ilmu politik.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan politik dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat supaya dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat Kabupaten Bener Meriah.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL BUDAYA POLITIK

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017” belum dilakukan sebelumnya. Namun penelitian yang relevan dengan penelitian tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Septi Meliana pada tahun 2011, dalam skripsi yang berjudul *Budaya Politik dan Partisipasi Politik (Suatu studi: Budaya Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat Di Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Desa Aek Tuhul Kecamatan Batunadua Padang Sidimpuan)*. Penelitian ini menjelaskan tentang budaya politik dan partisipasi politik. Penelitian ini dilakukan di Desa Aek Tuhul Kecamatan Batunadua Padangsidimpuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif 2009. Budaya politik adalah kesadaran masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Berdasarkan analisis bahwa adanya hubungan antara budaya politik dengan partisipasi politik Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2009. Penelitian ini hanya dilakukan kepada yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah.¹

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori tentang budaya politik, teori tentang partisipasi politik dan teori tentang pemilihan umum/sistem pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya politik masyarakat Desa Aek Tuhuk adalah

¹Septi Meliana, *Budaya Politik dan Partisipasi Politik (Suatu studi: Budaya Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat Di Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Desa Aek Tuhul Kecamatan Batunadua Padang Sidimpuan)*, (Medan: USU, 2011), hlm. 27.

budaya politik kaula yang masyarakat mempunyai minat perhatian, dan kesadaran terhadap sistem sebagai sistem keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Sikap masyarakat pada umumnya menerima saja sistem itu bersifat patuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Puspita Sari pada tahun 2011, dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Pelembagaan Partai Golkar Yogyakarta Terhadap Pola Perilaku Memilih Dalam Pemilu Legislatif 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelembagaan DPD Tingkat II Partai Golkar Yogyakarta, pola perilaku memilih masyarakat Kota Yogyakarta sebagai pemilih partai Golkar pada pemilu legislatif 2009 dan implementasi pendidikan politik yang dilakukan DPD tingkat II Partai Golkar Yogyakarta. Lokasi penelitian di DPD Tingkat II Partai Golkar Yogyakarta dan masyarakat kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi serta angket. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif induktif, dengan tahapan reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, pemaparan data, kesimpulan dan verifikasi.²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan Partai Golkar Kota Yogyakarta (mencakup derajat kesisteman hasil persilangan aspek internal dengan struktural, derajat identitas nilai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, derajat otonomi hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan derajat pengetahuan atau citra publik persilangan aspek eksternal dengan kultural). Dari indikator tersebut keputusan politik Partai

²Eko Puspita Sari, Pengaruh Pelembagaan Partai Golkar Yogyakarta Terhadap Pola Perilaku Memilih Dalam Pemilu Legislatif 2009(Yogiyakarta: UNY, 2011), hlm. 67.

Golkar Yogyakarta lebih ditentukan faktor eksternal. Dengan demikian pelembagaan Partai Golkar Yogyakarta kecenderungan lemah.

Pola perilaku memilih diukur melalui tiga pendekatan yaitu psikologis, sosiologis, dan rasional. Dari ketiga pendekatan tersebut pola perilaku memilih masyarakat Yogyakarta pada pemilu legislatif 2009 bervariasi. Variasi tersebut antara lain perilaku memilih sosiologis, psikologis, dan rasional. Namun, pola perilaku memilih tersebut cenderung mengarah pada perilaku memilih rasional. Pola perilaku memilih masyarakat belum benar-benar menggunakan pendekatan rasional.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar belum mencakup tiga komponen pendidikan politik antara lain adalah *civic knowledge, civic skill, dan civic dispositions* yang diberikan kurang lengkap. Pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar Kota Yogyakarta lebih pada kampanye pemilu. Dimana dalam pelaksanaan pendidikan politiknya diarahkan pada partisipasi aktif sebagai usaha dalam mencari dukungan suara dalam Pemilu legislatif 2009.

1.2 Pemilukada

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu system politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat subsistem politik daerah dalam bingkai system negara yang dianutnya. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia. Pemilukada langsung merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena

Pemilukada langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyat.³

Dengan Pemilukada langsung (pemilukadasung) maka akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Elit politik atau partai politik tidak bisa lagi menjatuhkan seenaknya seorang kepala daerah (kecuali ia melakukan tindakan criminal dan mengkhianati negara atau makar) karena ia merupakan pilihan rakyat, suara rakyat adalah pilihan rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*). Oleh karena itu seorang presiden yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi yang tinggi. Pemilu eksekutif daerah ini berada dalam koridor demokrasi lokal dalam lingkup asas pemerintahan yang desentralisasi dan didasarkan pada rel kebijakan publik UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan Kepala daerah langsung merupakan fenomena baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sepanjang sejarah pemerintahan, baru sekarang ini akan dilaksanakan Pemilukada secara langsung yang selama tahun 2005 melibatkan 16 pemda Propinsi dan 118 pemda Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia. Melihat begitu banyaknya pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada tersebut, maka akan menjadi sangat penting bagi semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaannya untuk memiliki persepsi yang sama, sehingga tahun 2005 kemarin bisa dijadikan tonggak demokrasi lokal di Indonesia.

Pada tahun 2017 kemarin terdapat 244 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah, terdiri atas lebih dari tujuh provinsi dan 237 kabupaten/kota. Akan sangat disayangkan ketika dalam pelaksanaannya di 224 pemerintahan daerah itu terjadi konflik atau permasalahan yang akan merusak dan berakibat fatal pada sistem pemerintahan di Indonesia.

³Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.320.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, kita dapat membahas adanya perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituennya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan daerah dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya. Lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilatar belakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dahulu dikeluarkan, yaitu Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah.

Kekuranganyangterdapatpadaundang-undangyangterdahulu adalah perlunya mengatur sistim pemilihan Kepala Daerah danwakil Kepala Daerah secara langsung, sebab diyakini pemilihan langsungmerupakan carayang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Dengan diadakannya metode pemilihan langsung Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh rakyat kemungkinan kolusi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat di eliminasi.⁴

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 56 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁵

Penyelenggaraan Pemilukada langsung menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersangkutan. Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah maka DPRD harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah selambat-

⁴Daniel S. Salossa, *Mekanisme, Persyaratan dan tata cara Pemilukada langsung*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2005), hlm. 9.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain memberitahukan kepada Kepala Daerah DPRD juga memberitahukan kepada KPUD perihal berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah minimal 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Setelah pemberitahuan dari DPRD maka KPUD berkewajiban untuk menetapkan tata cara dan jadwal tahapan

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan telah disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 hari sejak pemberitahuan dari DPRD, membentuk Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS yang manapaling lambat 21 hari sejak pemberitahuan dari DPRD.

Berdasarkan atas pemberitahuan dari DPRD maka Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.⁶ Setiap pasangan calon Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pemilu harus diajukan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik. Partai politik yang akan mengajukan calon Kepala Daerah tersebut harus memperoleh minimal 15% dari jumlah kursi yang ada di DPRD daerah atau 15% dari jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD daerah tersebut.⁷

Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pasal 2 ayat 1-4 dan pasal 3 ayat 1-3.

⁷UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan kepala daerah pasal 59 ayat 1 dan 2.

1.2.1 Tahapan Pemilukada

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa memenuhi syarat disebut sebagai Pemilukada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

PelaksanaanPemilukadalangsungdilaksanakanandalam2tahapyaitumasapersiapandantaha
ppelaksanaan,sebagaimanadikatakan dalam pasal 65 ayat

1.⁸Selanjutnyapadaayat2pasalyangsamadisebutkanbahwakegiatan-

kegiatanyangtercakupdalammasapersiapan adalah :

- a.PemberitahuanDPRDkepadakepala daerah mengenai berakhirnya masajabatan.
- b.PemberitahuanDPRDkepadaKPUD mengenai berakhirnya masa jabatankepala daerah
- c.Perencanaanpenyelenggaraanyangmeliputipenetapan tatacaradan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
- d. Pembentukan Panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS
- e. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Pada masa persiapan, maka keterlibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan Panitia Pengawas (Panwas), PPK, PPS, dan KPPS serta memiliki akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik melalui lembaga-lembaga tersebut.

Selanjutnya tahap pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan sesuai pasal 65 ayat 3, yaitu:⁹

- a. Penetapan daftar pemilih
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah / wakil kepala daerah.
- c. Kampanye

⁸Prihatmoko. Salossa, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka Pelajar*, (Jogjakarta, 2005), hlm 210.

⁹Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat 1 dan 2.

- d. Pemungutan Suara
- e. Penghitungan Suara
- f. Penetapan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

1.3 Budaya Politik

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu system nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Rusadi Kantaprawira dalam bukunya *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar* menjelaskan bahwa budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.¹⁰

Budaya politik adalah sebagai macam ide yang dianut bersama banyaknya anggota masyarakat tersebut, tidak saja tentang masalah-masalah politik, tapi juga tentang aspek-aspek kehidupan dan perubahan masyarakat. Almond dan Verba dalam David Marsh & Gerry Stoker yang mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara

¹⁰Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 25.

terhadap system politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.¹¹

Dengan kata lain, distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasar kanorientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya.

1.4 Budaya Politik Berdasarkan Sikap

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan atau sifat toleransi.¹²

1. Budaya Politik Militan

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah tumbal atau kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang pribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

¹¹David Marsh & Gerry Stoker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 54.

¹²Prihatmoko, Joko J, *Pemilihan Kepala Daerah langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 213.

2. Budaya Politik Toleransi

Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari *consensus* yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang. Tidak hanya sampai disini, lebih lanjut jika kita melihat sikap yang ditunjukkan terhadap tradisi dan perubahan maka kita akan dihadapkan pada 2 tipe budaya politik yang lain, yakni budaya politik dengan sikap mental absolut dan mental akomodatif.

3. Budaya Politik Absolut

Budaya politik dengan struktur masyarakatnya memiliki sikap mental *absolute* menekankan pada nilai-nilai dan kepercayaan yang bersifat *absolute* atau selalu dianggap sempurna sehingga tidak dapat dirubah. Hal ini berakibat dengan sikap budaya politik yang cenderung kaku dan sulit untuk menerima suatu pembaharuan. Budaya politik *absolute* biasanya berasal dari tradisi yang kuat dan berjalan secara turun temurun.

Sebagai salah satu contoh sikap budaya politik absolute yang terjadi di Indonesia adalah pengangkatan terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena masyarakat telah memiliki mental *absolute* dimana mereka tetap mempercayakan kepemimpinan tertinggi di Yogyakarta pada keturunan dari Kesultanan Mataram yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono meskipun tetap menggunakan pemilu sebagai legalitasnya.

4. Budaya politik Akomodatif

Sikap mental akomodatif adalah kebalikan dari sikap mental absolut dimana pada sikap mental akomodatif ini dimungkinkan untuk menerima perubahan-perubahan selagi hal ini dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai dan norma. Masyarakat dapat melepaskan dan memisahkan antara tradisi dengan budaya politik. tidak menutup kemungkinan dengan sikap

akomodatif ini masyarakat kembali ke tradisi. Jika hal baru yang telah mereka coba tidak sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai.

1.5 Budaya Politik Berdasarkan Orientasi Politik

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang terdapat dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Berdasarkan realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond sebagaimana dikutip oleh Cholisin dan Nasiwan mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut:¹³

1. Budaya Politik Parokial

Budaya Politik Parokial (*parochial political culture*) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Menyangkut budaya yang terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat provincial. Karena wilayah yang terbatas acapkali pelaku politik sering memainkan peranannya seiring dengan diferensiasi, maka tidak terdapat peranan politik yang bersikap khas dan berdiri sendiri. Yang menonjol dalam budaya politik adalah kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan\kekuasaan politik dalam masyarakat.

2. Budaya Politik Kaula

Budaya Politik Kaula (*subyekpoliticalculture*) yaitu dimana pola berpolitik dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif. Anggota masyarakat mempunyai minat perhatian,

¹³Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 32.

mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya.

Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan oleh karena itu menyerah saja pada kepada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya Politik Partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk memberi penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan. Budaya politik terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatarbelakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi.

Orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam pemberian suara (voting) terlibat langsung dalam budaya politik. Dalam hal ini budaya politik sering kali bisa kita rasakan implementasinya adalah pada saat pemilu atau Pilkada. Dimana pada saat itu eksistensi kebudayaan hadir didalam politik. Maka tak heran bahwa unsure-unsur kebudayaan seperti kesamaan etnis ataupun suku menjadi bagian yang tidak bisa hilang ditengah maraknya semangat berdemokrasi.

Budaya Politik menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami karena ada dua sistem. Pertama, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan, hal yang diminta, cara tuntutan itu diutarakan, respon dan dukungan terhadap golongan elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. Kedua, dengan mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat

menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil.

1.6 Perilaku Memilih

Perilaku merupakan sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia yang dapat membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik yang pada dasarnya merupakan perilaku politik yang berupa kegiatan-kegiatan yang memiliki hubungan dengan politik atau disebut kegiatan politik.

Oleh karena itu, perilaku politik dibagi menjadi dua yakni perilaku politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan para pejabat pemerintah, serta perilaku politik yang dilakukan oleh warga negara biasa.¹⁴

Kegiatan politik yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah dan para pejabat pemerintah tersebut adalah bertanggungjawab atas wewenang proses politik, sedangkan kegiatan politik yang dilakukan oleh warga negara biasa adalah partisipasi politik. Misalnya, warga negara memberikan suaranya atau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dengan cara memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati yang diinginkannya. Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵

¹⁴Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 267.

¹⁵Eko Puspita Sari, *Pengaruh Pelembagaan Partai Golkar Yogyakarta Terhadap Pola Perilaku Memilih Dalam Pemilu Legislatif 2009*, (Skripsi. UNY, 2011), hlm. 58.

Perilaku memilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku memilih merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku memilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi ada pula sekelompok orang yang memilih kandidat politik karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga, yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku memilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian, pengaruh sistem sosial yang ada di masyarakat, pengaruh media massa, dan aliran politik.¹⁶

Perilaku memilih merupakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk menentukan dan memilih salah satu calon dari kontestan politik yang ada pada Pemilu lokal yaitu calon bupati dan wakil bupati. Dalam hal ini, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruh dan mereka yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Dinyatakan sebagai pemilih dalam Pemilu lokal yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih.

Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik yang nantinya dapat dijadikan sebagai sarana untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik, misalnya menjadi anggota atau menjadi kader dari partai politik tertentu.

¹⁶Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 85.

Perilaku memilih dapat ditunjukkan dalam pemberian suara dengan cara menentukan siapa calon yang akan dipilih menjadi bupati dan wakil bupati dalam PemiluKada secara langsung. Pemberian suara dalam PemiluKada secara langsung diwujudkan dengan memberikan suara pada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Adapun perilaku memilih menurut Ramlan Surbakti adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum. Bila pemilih memutuskan untuk memilih maka pemilih akan memilih dan mendukung kandidat tertentu.¹⁷

Keputusan untuk memberikan dukungan dan memberikan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan. Perilaku memilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu.

Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Sehingga, selama periode kampanye muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi yang sama dan menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.¹⁸ Menurut Muhammad Asfar, untuk menjelaskan secara teoritis tentang voting behavior didasarkan pada dua model atau pendekatan, yaitu model atau pendekatan sosiologi dan model atau pendekatan psikologis. Di lingkungan ilmuwan Amerika Serikat, model pertama disebut sebagai mazhab Columbia atau The Columbi School of Electoral Behavior,

¹⁷Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 185.

¹⁸Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.89-90.

sementara model kedua disebut sebagai mazhab Michigan atau The Michigan Survey Research Centre.

Mazhab pertama lebih menekankan pada peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, sedangkan mazhab kedua lebih mendasarkan faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politiknya. Jadi mazhab pertama dikenal sebagai model atau pendekatan sosiologis, sementara mazhab yang kedua dikenal sebagai model atau pendekatan psikologis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Penggunaan metode ini dikarenakan agar dapat meminimalkan jarak antara peneliti dan sumber penelitian/informan. Dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan dan segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Penelitian kualitatif adalah suatu cara ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena permasalahan yang diteliti.¹ Penelitian ini ingin memberikan gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata dan penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

¹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 18.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.² Responden merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian ini.

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu) yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan kriteria, ciri-ciri tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai melalui suatu penelitian.³

Adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti, yaitu masyarakat, tokoh masyarakat ketua pps, ketua pp, komisioner kip, panwaslu, pihak kecamatan, imeum mukim dan geuchik. Berdasarkan kriteria di atas, maka ditentukan subjek penelitian sebanyak 28 orang, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Pemilih (20 orang)
2. Ketua PPL (1 orang)
3. Komisioner KIP (1 orang)
4. Panwaslu (1 orang)
5. Keuchik (3 orang)
6. Pihak Kecamatan (1 orang)
7. Imem Mukim (1 orang)

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 85.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 224.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang dipersiapkan.

Untuk memperoleh data, yakni jawaban lisan dan tertulis tentang pokok pertanyaan peneliti di atas dari informan yang ditetapkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi.⁴ Berikut ini dijelaskan secara singkat, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dijadikan sebagai informan, bertatap muka langsung dengan berpedoman kepada pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, peneliti melakukan wawancara yang dilaksanakan secara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 224-145.

lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵

Peneliti dengan cara menelusuri data-data yang cocok dengan judul skripsi ini tujuan dari pengumpulan data tersebut adalah untuk memperkuat data yang didapat dilapangan sebagai bukti bahwa penulis melakukan penelitian digampong tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman sebagai manayang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.⁶

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 274.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 246-252.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyinkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis terhadap budaya politik masyarakat di lokasi penelitian. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.
3. *Conclusion Drawing/Verification*, yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi.
4. Peneliti berusaha menarik kesimpulan terhadap temuan baru yang sebelumnya masih bersifat sementara (hipotesa) objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Permata merupakan sebuah wilayah administratif yang berada dalam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dengan Ibu Kota Gelumpang Wih Tenang Uken, Wilayah ini merupakan kawasan utama lintasan jalan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) hingga ke perbatasan di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Sebagai salah satu kecamatan terluas di kabupaten Bener Meriah.

Tabel 4.1
Profil Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

No	Keterangan Profil	Jumlah
1	Jumlah Desa	27 Desa
2	Jumlah Penduduk	15.744 Jiwa
3	Puskesmas	1 Unit
4	Pustu	5 Unit
5	Polindes	6 Unit
6	Taman Kanak-kanak	8 Unit
7	Sekolah Dasar	15 Unit
8	Sekolah Menengah Pertama	6 Unit
9	Sekolah Menengah Atas	2 Unit
10	Madrasah Ibtidaiyah	4 Unit
11	Madrasah Tsanawiyah	3 Unit
12	Madrasah Aliyah	1 Unit

Sumber: Skretariat Kecamatan Permata

Komposisi alam Permata di kategorikan sangat subur dengan jenis tanah podjolik yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman pertanian, seperti kopi, tembakau, teh, cabe, kubis, jagung, kentang, tomat dan segala

jenis sayuran. Wilayah Selimut Kabut ini cenderung dataran tinggi karena berada disepanjang lereng Gunung Geureudong sebab itu cuacanya lumayan sejuk mencapai 200 °C. Kecamatan Permata tercatat sebagai lahan tanaman kopi gayo jenis varian arabika terluas, mencapai 9.147,50 Ha. Dengan meningkatnya prospek perkopian Nasional dan Internasional saat ini, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah membuka peluang investasi seluas-luasnya kepada investor baik dari dalam negeri maupun investor asing untuk memanfaatkan potensi yang cukup besar untuk pengembangan komoditas kopi.

Berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Permata terdiri dari 26 Desa/kelurahan dengan ibu kota Gelampang Wih Tenang Uken, yang saat ini menjadi pusat sektor pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Luas Wilayah 159,66 Km (15 744 Jiwa angka perhitungan 2017 - 2017). Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 17,0 Km, Jarak Ke ibu kota Provinsi 412.5 Km. adapun desa-desa di Kecamatan Permata meliputi desa Ayu Ara, Bale Musara, Bale Purnama, Bener Pepanyi, Bintang Bener, Bintang Permata, Buntul Peteri, Burni Pase, Ceding Ayu, Darul Aman Ramung, Gelampang Wih Tenang Uken, Jelobok, Jungke, Kepies, Pantan Tengah Jaya, Penosan Jaya, Ramung Jaya, Rikit Musara, Seni Antara, Suku Sara Tangke, Tawar Bengi, Temas Mumanang, Timur Jaya, Uning Sejuk, Wih Tenang Toa, Wih Tenang Uken.

Penduduk Permata, Bener Meriah cukup beragam, mayoritas adalah Suku Gayo, namun terdapat juga suku Jawa, suku Aceh dan suku Karo. aktivitas sehari-hari penduduk Permata lebih dominan dalam mengurus serta merawat kebun Kopi, sementara sebagian kecil adalah pedagang dan pegawai negeri.

4.2 Hasil Penelitian

Kabupaten Bener Meriah merupakan yang menggelar pemilukada serentak dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernur pada tanggal 15 Februari 2017 lalu. Penelitian ini mengkaji mengenai budaya politik dan perilaku memilih masyarakat khususnya di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017. Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah diikuti oleh 7 Pasangan Calon (Paslon) dengan jumlah pemilih 96.727 orang yang terdiri dari 48.269 pemilih laki-laki dan 48.456 pemilih perempuan.

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 untuk pemilihan bupati/wakil bupati diikuti oleh 7 pasangan calon (Paslon) dalam memperebutkan tampuk pimpinan tertinggi di salah satu kabupaten di dataran tinggi Gayo tersebut. Adapun hasil Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah diungguli oleh Paslon nomor urut 3 yaitu Ahmadi, SE dan Tgk. H. Sarkawi yang meraup 29.554 suara (37.88%) yang mengalahkan 6 Paslon lainnya.

Pasangan Calon (Paslon) dengan nomor urut 3 yaitu Ahmadi, SE dan Tgk. H. Sarkawi ini, dalam dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 diusung oleh partai Golkar dengan visi yaitu menciptakan Kabupaten Bener Meriah Islami, harmoni, maju dan sejahtera melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah
2. Mewujudkan Pelayanan Prima sebagai wujud reformasi Birokrasi
3. Mewujudkan Infrastruktur Publik yang berkeadilan

4. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian dan Perkebunan yang berkeadilan
5. Mewujudkan Pendidikan berkualitas dan Berdaya Saing
6. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang lebih Optimal bagi masyarakat
7. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang harmonis
8. Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Mandiri dan Berkeadilan

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pemilih khususnya di Kecamatan Permata sebagai berikut: ¹

Tabel 4.2
Data Pemilih Kecamatan Permata Pada Pemilu 2017

No	Rincian Suara Pemilih	Jumlah	Persentase
1	Suara sah	9.495 Suara	81,3%
2	Suara tidak sah	386 Suara	4,1%
3	Golput	1.578 Suara	14,6
Total		11.410 Suara	100%

Sumber: KIP Kabupaten Bener Meriah

Secara teoritis, dengan partisipasi politik pemilih yang begitu besar maka dapat dipastikan bahwa budaya politik masyarakat Kecamatan Permata termasuk dalam budaya politik partisipan yang ditandai dengan kesadaran politik tinggi. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk memberi penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan. Budaya politik terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatar belakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi.

¹ Muhtarudin, M.BA, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 23 Juli 2018.

Dalam penelitian ini diambil sebanyak 28 orang subjek/responden penelitian, yang terdiri dari masyarakat pemilih (20 orang), Ketua PPL (1 orang), komisioner (ketua) KIP Kabupaten Bener Meriah (1 orang), Panwaslu (1 orang), Keuchik (3 orang), Camat Permata (1 orang) dan Imem Mukim (1 orang). Masing-masing responden diwawancari dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan sebelumnya. Kendati demikian, saat memerlukan pendalaman atau pemahaman lebih lanjut diajukan pertanyaan-pertanyaan secara spontan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan data dalam penelitian ini.

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Pemaparan hasil penelitian dirangkum dalam dua tema besar. Pertama, mengenai bagaimana budaya politik masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah tahun 2017. Bagian pertama ini menjelaskan tentang budaya politik yang terdapat pada masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Disamping itu juga diungkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya budaya politik yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilukada tahun 2017. Pada bagian kedua ini akan dipaparkan mengenai perilaku memilih yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilukada tahun 2017. Dijelaskan pula mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku memilih pada masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilukada tahun 2017.

4.2.1 Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017

Budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada didalam sistem tersebut. Budaya politik sebagai salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya.²

Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah yang mempunyai budaya politik partisipan terbukti dalam ajang perhelatan akbar pemilihan bupati/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernur yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017.

4.2.1.1 Alasan Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Permata maka dapat diketahui bahwa alasan sebagian besar masyarakat Permata menggunakan hak pilihnya karena mereka menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 58.

Karena dengan mengikuti Pemilukada, berarti mereka turut serta membantu mengubah negeri ini menjadi lebih baik. Mereka juga menggunakan hak pilihnya untuk menyalurkan aspirasinya karena mereka menyadari sebagai Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam mengikuti pemilihan kepala daerah tahun 2017.³

Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa warga Kecamatan Permata merupakan masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan pada aspek output Pemilukada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kecamatan Permata memiliki keikutsertaan atau kepedulian terhadap negara dan daerahnya untuk ikut serta mengubah daerah dan negaranya ini supaya menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan oleh mereka dengan cara mengikuti atau menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Setelah dilakukan wawancara, ternyata sebagian besar dari masyarakat Kecamatan Permata yang memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati juga dikarenakan visi misi pasangan tersebut yaitu menciptakan Kabupaten Bener Meriah Islami, harmoni, maju dan sejahtera melalui misi mewujudkan pelaksanaan Syariaat Islam secara kaffah, mewujudkan pelayanan prima sebagai wujud reformasi birokrasi, mewujudkan infrastruktur publik yang berkeadilan, mewujudkan tata kelola pertanian dan perkebunan yang berkeadilan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing, mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat, mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis, mewujudkan perekonomian yang kuat, mandiri dan berkeadilan.

³ Hasbullah, Masyarakat Pemilih/Petani Kebun warga Desa Timur Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

4.2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kecamatan Permata Dalam Memilih Salah Satu Paslon Pada Pemilu 2017

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilu Kabupaten Bener Meriah tahun 2017, memang terdapat banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat permata untuk memilih calon bupati dan wakil bupati. Faktor-faktor yang mempengaruhi mereka antara lain adalah faktor agama, pendidikan dan visi misi yang diusung oleh Paslon bupati dan wakil bupati dalam Pemilu Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Faktor pendidikan yang tinggi dari calon bupati dan wakil bupati sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilu Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 karena mereka beranggapan bahwa calon bupati dan wakil bupati yang memiliki pendidikan tinggi berarti memiliki pengetahuan yang luas dan dengan pengetahuannya itu, diharapkan dapat memimpin Kabupaten Bener Meriah untuk lima tahun ke depan supaya lebih baik lagi terutama terhadap pembangunan infrastruktur jalan, pertanian dan perkebunan, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.⁴

Selain itu juga hampir sebagian besar masyarakat juga memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati karena kesamaan agama. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga memilih karena kesamaan suku. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor serta pertimbangan yang menyebabkan

⁴ Zulhammi, Masyarakat Pemilih/Petani Kebun Warga Desa Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

seseorang menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilukada bukan hanya berdasarkan pada agama dan suku semata. Tetapi ada faktor lain yaitu tingginya tingkat pendidikan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Dalam budaya politik terdapat orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Sehingga, dalam penelitian ini masyarakat Permata telah diberi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara, yang ditujukan untuk menguji sifat partisipan dari budaya politik masyarakat Permata dimana budaya politik partisipan memiliki karakteristik partisipan aktif yang tinggi baik terhadap objek-objek input maupun objek-objek output dari sistem politik.

4.2.1.3 Orientasi Budaya Politik Kognitif Pada Masyarakat Kecamatan Permata Dalam Pemilukada 2017

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dalam budaya politik partisipan berdasarkan orientasi kognitif yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti visi dan misi calon bupati dan wakil bupati yang sudah dipilih mereka, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan Negara.⁵ Dalam budaya politik partisipan masyarakat berperan

⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 16.

secara aktif dalam pemberian suara dan mereka pun mempunyai pengetahuan tentang politik, budaya politik, atribut negara serta visi dan misi dari calon bupati dan wakil bupati yang akan dipilihnya.

Dari hasil penelitian dilapangan terdapat fakta bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata mengatakan bahwa visi dan misi yang dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati berpengaruh terhadap pilihan politik mereka ketika Pemilu di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 dan sebagian kecil masyarakat Kecamatan Permata yang menjawab bahwa visi dan misi yang dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati tidak berpengaruh terhadap pilihan politik mereka. Namun ketika dilakukan wawancara secara mendalam ternyata sebagian besar dari mereka banyak yang tidak mengetahui secara detail isi dari visi dan misi yang dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bener Meriah yang sudah dipilihnya. Sedangkan masyarakat Kecamatan Permata yang mengetahui secara detail isi dari visi dan misi yang dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati hanya sebagian kecil masyarakat saja. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh PPS Kecamatan Permata serta KIP Kabupaten Bener Meriah pada masyarakat Kecamatan Permata dalam Pemilu di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 untuk memilih bupati dan wakil bupati dapat dikatakan sepenuhnya terlaksana dengan baik.⁶

Selain itu, terdapat alasan lain yang mempengaruhi mereka untuk memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati yaitu adanya hibah atau hadiah berupa uang yang dibagi-bagikan oleh tim sukses yang ada di Kecamatan Permata.

⁶ Ayub Umar, Mukim Gelumpang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 24 Juli 2018.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum masyarakat Kecamatan Permata mempunyai budaya politik partisipan dimana mereka mempunyai pengetahuan tentang isi dari visi dan misi yang dibawa oleh Paslon bupati dan wakil bupati yang sudah mereka pilih. Masyarakat Permata menjadi partisipan pada output sistem politik sebab mereka sudah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 yang lalu.

Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan politik atau aspek kognitif dari budaya politik masyarakat Kecamatan Permata, maka dilakukan wawancara secara dalam kepada mereka mengenai pengetahuan tentang pengertian dari politik dan budaya politik. Berdasarkan hasil wawancara terdapat fakta bahwa sebagian kecil masyarakat Kecamatan Permata yang mengerti apa itu pengertian politik. Selain itu, juga ditemukan fakta lain bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata tidak mengetahui pengertian dari budaya politik sebab hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui pengertian budaya politik.

Hal ini di sebabkan karena kurangnya kesempatan mereka dalam mengikuti diskusi-diskusi politik baik untuk ikut serta langsung dalam kegiatan politik maupun untuk melihat atau mendengarkan berita politik serta kurangnya pengetahuan mereka terhadap politik dan budaya politik, karena keseharian mereka sibuk dengan aktivitas rutin di kebun-kebun atau ladang-ladang untuk bercocok tanam.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh di sekretariat Kecamatan Permata diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Permata rendah

⁷ Al Mahdi, Reje Kampung/Geuchik Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 24 Juli 2018.

karena sebagian besar dari mereka hanya lulusan sekolah dasar sebanyak 161 orang dan lulusan sekolah menengah pertama sebanyak 245 orang bahkan ada juga dari mereka yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 150 orang. Adapun masyarakat yang lulusan sekolah menengah atas sebanyak 81 orang dan lulusan perguruan tinggi hanya sebagian kecil saja yaitu sebanyak 56 orang. Hampir sebagian besar masyarakat di Kecamatan Permata juga lebih mengutamakan pekerjaan mereka dibandingkan memikirkan hal yang berbau politik.⁸

Masyarakat Kecamatan Permata memiliki ciri budaya politik partisipan. Sebab mereka sudah berpartisipasi dalam output sistem politik yaitu dengan cara menggunakan hak pilihnya pada PemiluKada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017, untuk memilih salah satu Paslon bupati dan wakil bupati yang diinginkan oleh mereka.

4.2.1.4 Orientasi Budaya Politik Afektif Pada Masyarakat Kecamatan Permata Dalam PemiluKada 2017

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan masyarakat, dapat dilihat gambaran yang jelas bagaimana perasaan masyarakat dalam mengikuti PemiluKada, dimana sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata menyatakan bahwa mengikuti PemiluKada itu penting. Masyarakat Kecamatan Permata sudah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap PemiluKada. Terdapat keyakinan dalam psikologi individual dari masyarakat Kecamatan Permata bahwa dengan menggunakan hak pilihnya pada PemiluKada dapat membawa perubahan ke arah

⁸ Sabarudin, Camat Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Permata pada khususnya dan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah pada umumnya. Ada keyakinan yang dipegang individu-individu pada suatu tingkat tertentu tentang kepercayaan akan instrumen PemiluKada.

Selain itu, juga terdapat fakta lain yaitu sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata menyatakan bahwa mereka merasa perlu untuk mengikuti PemiluKada sebab mereka menganggap bahwa menggunakan hak pilihnya pada PemiluKada sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara Indonesia. Mereka juga mempunyai harapan, bahwa dengan adanya PemiluKada bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Permata khususnya dan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah pada umumnya. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Permata sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya mengikuti PemiluKada. Selain itu, masyarakat Kecamatan Permata juga sudah mempunyai kepedulian dan harapan terhadap sistem politik yaitu harapan akan adanya perubahan yang lebih baik melalui PemiluKada.⁹

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa budaya politik masyarakat Kecamatan Permata pada aspek input politik memang sudah ada yaitu pemahaman akan pentingnya mengikuti PemiluKada dan harapan akan perubahan yang lebih baik melalui PemiluKada. Sehingga dapat diasumsikan bahwa masyarakat Kecamatan Permata mempunyai ciri budaya politik partisipan. Dimana mereka sudah mempunyai kepedulian dan harapan terhadap sistem politik

⁹ Zulhammi, Masyarakat Pemilih/Petani Kebun Warga Desa Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

dan mereka juga sudah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Selanjutnya mengenai perasaan masyarakat Kecamatan Permata dalam mendiskusikan masalah politik di pemerintahan dan bagaimana perasaan mereka setelah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada. Maka, dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata merasa atau menganggap bebas berdiskusi atau berbicara mengenai politik dengan semua orang dan mereka juga menganggap bahwa berdiskusi mengenai politik dapat dilakukan secara bebas oleh siapa saja. Masyarakat Kecamatan Permata menyatakan bahwa perasaan dibatasi dalam berdiskusi mengenai politik relatif tidak ada dalam masyarakat Kecamatan Permata.¹⁰

Hal ini merupakan salah satu hal yang penting untuk terciptanya struktur masyarakat yang demokratis. Berbeda dengan sistem politik yang totaliter dimana komunikasi politik dikontrol secara ketat oleh pemerintah dan melakukan kritik terhadap pemerintah dan sistem politiknya sangat beresiko. Jika kita ingin mengaitkan perasaan masyarakat dalam mendiskusikan politik dengan sistem politik yang demokratis, dapat dilihat suatu gambaran adanya keterbukaan politik. Sebab dalam masyarakat Kecamatan Permata tidak ada pembatasan yang cukup serius yang membuat masyarakat menghindari untuk melakukan komunikasi politik.

Pada masyarakat Kecamatan Permata dijumpai frekuensi yang tinggi mengenai perasaan bebas dalam mendiskusikan politik. Kesadaran ini pada

¹⁰ Fatma Wati, Masyarakat Pemilih/Petani Kebun/Ibu Rumah Tangga Warga Desa Bale Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

tingkat tertentu menunjukkan pemahaman masyarakat akan adanya keterbukaan politik. Tetapi pada kenyataannya, mayoritas masyarakat Kecamatan Permata melakukan pembicaraan politik dengan intensitas yang relatif rendah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mereka memang bisa bebas melakukan pembicaraan politik dengan orang lain tanpa adanya kontrol yang ketat atau tekanan dari pemerintah. Tetapi, bagi mereka melakukan pembicaraan politik belum menjadi menu pembicaraan sehari-hari. Sebab mereka sibuk bekerja di kebun-kebun atau ladang-ladang untuk bercocok tanam dari pagi hari sampai sore hari, bahkan ada yang bekerja sampai malam hari.

Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa masyarakat di Kecamatan Permata menganggap bahwa berdiskusi mengenai politik ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Walaupun mereka mempunyai pemahaman yang kurang mengenai politik dan budaya politik. Tetapi, mereka kadang-kadang juga masih melakukan pembicaraan tentang politik dengan intensitas yang relatif rendah. Sehingga dapat diasumsikan bahwa masyarakat Kecamatan Permata termasuk dalam tipe budaya politik subjek partisipan. Dimana mereka tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam kegiatan politik dengan cara yang lebih pasif. Mereka hanya berpartisipasi dalam output sistem politik yaitu mereka sudah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Masyarakat Kecamatan Permata juga mengikuti perkembangan berita-berita politik dengan frekuensi yang tidak terlalu sering, tetapi mereka juga tidak berusaha untuk mengawasi, mengawal, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja

sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosional mereka terhadap negaranya tidak terlalu besar. Selain itu masyarakat juga tidak berperan aktif dalam mengawasi atau mengontrol serta mengkritisi jalannya pemerintahan dan ambil bagian dalam input sistem politik yaitu ikut serta untuk mempengaruhi kebijakan politik.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan fakta bahwa perilaku politik warga masyarakat Kecamatan Permata dalam mempengaruhi pejabat pemerintahan dalam proses pembuatan kebijakan politik ditingkat lokal minim. Dari hasil jawaban masyarakat Kecamatan Permata, sebagian besar dari mereka, mengakui bahwa mereka tidak pernah mencoba mempengaruhi pemerintahan lokal dalam kegiatan politik dan pembuatan kebijakannya. Partisipasi masyarakat Kecamatan Permata dalam input sistem politik relatif minim. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa keyakinan dan kepercayaan untuk memaksakan pengaruh mereka belum terlihat dalam perilaku politiknya. Hal ini disebabkan karena mereka hanya merasa sebagai masyarakat petani yang tidak mempunyai kekuasaan dan tidak mempunyai pengaruh dalam pemerintahan. Selain itu, mereka juga tidak yakin dapat mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bener Meriah. Kompetensi politik masyarakat Kecamatan Permata sebagai warga negara belum terlihat khususnya dalam menggunakan pengaruhnya terhadap input sistem politik yaitu dalam pembentukan kebijakan politik. Sedangkan masyarakat yang memiliki keyakinan dapat mempengaruhi kebijakan politik hanya sebagian kecil saja.

¹¹ Ibrahim Saleh, Reje Kampung/Guecik Desa Kepies, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa pada masyarakat Kecamatan Permata terdapat ciri budaya politik subjek partisipan, dimana sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata merasa tidak memiliki keyakinan dapat mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Tetapi, disisi lain mereka juga sudah berpartisipasi pada output sistem politik, yaitu dengan cara menggunakan hak pilihnya pada Pemilu di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden sebelumnya yang terdapat pada aspek afektif budaya politik, dimaksudkan untuk menentukan pola-pola kesadaran output sistem politik supaya dapat dilihat apakah masyarakat merasakan bahwa pemerintah memberikan pengaruh kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Pertanyaan selanjutnya bermaksud untuk melihat apakah masyarakat di Kecamatan Permata mengikuti atau menaruh perhatian pada urusan-urusan pemerintahan dan urusan politik atau tidak. Pertanyaan ini untuk melihat frekuensi orientasi partisipan masyarakat Kecamatan Permata apakah mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan politik dan kegiatan pemerintahan atau tidak. Sehingga jika mereka mengikuti berbagai kegiatan politik dan pemerintahan dalam beberapa hal, otomatis mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Kebudayaan politik, mencakup pengertian kewajiban untuk mengambil bagian dalam aktivitas input sistem politik termasuk kompetensi untuk ambil bagian. Tentu saja untuk mengikuti aktivitas politik dalam pemerintahan dan menaruh perhatian pada urusan politik hanyalah merupakan komitmen yang terbatas. Walaupun begitu, tidak ada kebudayaan politik tanpa faktor-faktor tersebut.

4.2.1.5 Orientasi Budaya Politik Evaluatif Pada Masyarakat Kecamatan Permata Dalam Pemilukada Tahun 2017

Analisis berikut ini akan menampilkan unsur-unsur evaluatif dari orientasi budaya politik dan kesadaran politik masyarakat Kecamatan Permata pada output sistem politik. Kesadaran output atau subjek warga masyarakat Kecamatan Permata memperlihatkan adanya suatu kadar yang standar dalam mengikuti kegiatan politik dan pemerintahan. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa pernah mengikuti kegiatan politik dan kegiatan pemerintahan seperti halnya mengikuti kegiatan politik di Kecamatan ataupun mengikuti acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta ruang konsultasi dan rapat baik yang diselenggarakan DPRK, Pemkab, pihak kecamatan maupun ditingkat gampong di balai Gampong.¹²

Selain itu, juga sudah ada partisipasi politik masyarakat Kecamatan Permata terhadap input dan output sistem politik. Sebab, masyarakat Kecamatan Permata juga sudah mempunyai kepedulian terhadap output sistem politik yaitu menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada dan mereka juga sudah mempunyai harapan supaya mempunyai kehidupan yang lebih baik setelah diadakannya Pemilukada. Peraturan ataupun kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah bersifat mengikat masyarakat.

Secara kolektif masyarakat mau atau tidak mau harus mengikuti peraturan dan kebijakan yang dibuat tersebut. Pelaksanaan dari kebijakan dan peraturan itu sendiri memiliki sanksi yang bersifat paksaan yang berlaku bagi setiap warga

¹² Sabarudin, Camat Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

negara. Pada tingkat manakah masyarakat memiliki kesadaran akan kebijakan dan peraturan politik yang dibuat menyangkut kehidupan dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ditemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata peduli mengenai peraturan dan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena mereka merasakan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, mempunyai dampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi, ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ternyata memberatkan mereka dan tidak sesuai dengan kepentingan mereka maka mereka tidak mempunyai keinginan untuk melakukan protes karena mereka hanya merasa sebagai petani yang tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Sehingga, mereka cenderung menerima dan melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat.¹³

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan hanya peduli pada sebagian peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pusat. Sedangkan yang memiliki orientasi yang tinggi terhadap output sistem politik yaitu yang peduli pada semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pusat hanya sebagian kecil masyarakat saja.

¹³ Ayub Umar, Mukim Gelumpang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 24 Juli 2018.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan Permata memang memiliki orientasi terhadap output sistem politik yaitu mereka peduli dan mematuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi orientasi masyarakat Kecamatan Permata terhadap input sistem politik relatif masih rendah yaitu minimnya upaya untuk mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pada masyarakat Kecamatan Permata orientasi politiknya belum bersifat sepenuhnya aktif pada input dan output sistem politik yang mana menjadi karakteristik budaya politik partisipan.

Dalam pembahasan ini juga ditujukan untuk menguji sifat partisipan dari budaya politik masyarakat Kecamatan Permata dimana budaya politik partisipan memiliki karakteristik partisipan aktif yang tinggi baik terhadap objek-objek input maupun objek-objek output dari sistem politik. Sehingga, perlu untuk mengetahui aspek evaluatif masyarakat Kecamatan Permata terhadap output sistem politik pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah, dimana masyarakat mempunyai pengetahuan dan mengetahui proses kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah selama 1 setelah diadakannya Pemilukada.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah selama 1 tahun ini, dapat dikatakan sudah cukup lumayan, tidak terlalu mengecewakan dan juga tidak terlalu buruk. Mereka merasa cukup puas dengan kinerjanya bupati/wakil bupati karena mereka merasa sudah ada sedikit perubahan jika dibandingkan 1 tahun sebelumnya, sebelum adanya

bupati/wakil bupati yang terpilih. Masyarakat merasa cukup puas sebab melihatnya dari satu aspek saja yaitu terdapat program kerja pemerintah di Kabupaten Bener Meriah untuk memperbaiki dan pembangunan inprastruktur jalan, pertanian dan perkebunan, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Terutama beberapa jalan desa dan kecamatan sekarang memang sudah diperbaiki dan jalannya juga sudah mulus karena sudah diaspal.¹⁴

Selain itu, infrastruktur lain yang juga sudah dibangun adalah dibuatkannya drainase di sepanjang jalan yang berada di Kecamatan Permata sepanjang 63 Km. Jadi, sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata, mengevaluasi kinerja bupati dan wakil bupati yang terpilih dari melihat pembangunan infrastruktur yang tampak. Masyarakat belum menyentuh evaluasi kinerja dari program kerja pada pelayanan birokrasi di instansi-instansi pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah.

Selain itu, visi dan misi dari bupati dan bapak wakil bupati terpilih, salah satu program kerjanya memang ada program kerja untuk memperbaiki infrastruktur sejumlah pertanian dan jalan-jalan di beberapa kampung yang rusak, salah satunya jalan utama dari Kecamatan Permata menuju Kecamatan Timang Gajah yang sudah diperbaiki dan jalannya sudah mulus. Sehingga, sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata menyatakan bahwa kinerja beliau cukup lumayan. Sebab mereka melihat bukti nyata yang tampak, tanpa mereka mengevaluasi program kerja yang berupa kinerja birokrasi-birokrasi

¹⁴ Jarkasi, Reje Kampung/Guecik Desa Bale Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

yang terdapat di instansi-instansi pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah. Walaupun begitu, setidaknya sebagian masyarakat Kecamatan Permata, sudah mempunyai kepedulian untuk mengevaluasi program kerja pemerintah daerah di Kabupaten Bener Meriah.¹⁵

Sehingga dapat diasumsikan bahwa masyarakat Kecamatan Permata mempunyai ciri budaya politik partisipan. Sebab mereka mempunyai kepedulian terhadap salah satu output sistem politik pemerintah daerah di Kabupaten Bener Meriah yaitu program kerja membangun dan perbaikan infrastruktur pertanian dan jalan yang rusak. Selain itu, juga ditemukan fakta lain yang terdapat pada sebagian kecil masyarakat Desa yang menyatakan belum puas dengan kinerja bupati/wakil bupati terpilih selama 1 tahun terakhir. Sebab, belum ada perubahan yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah khususnya di Kecamatan Permata.

4.2.2 Perilaku Memilih Pada Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017

Perilaku memilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku memilih merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dalam upaya pemahaman terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Permata pada

¹⁵ Sabarudin, Camat Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.

4.2.2.1 Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Permata Pemilukada Tahun 2017 Berdasarkan Pendekatan Sosiologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata memilih dikarenakan alasan tingkat pendidikan yang tinggi dari calon bupati dan wakil bupati yang sudah mereka pilih. Selain itu, aspek keagamaan juga menjadi salah satu alasan mereka untuk memilih sebab mereka merasa bahwa calon bupati dan wakil bupati yang sudah dipilih tersebut, merupakan seseorang yang beragama dengan baik dalam arti taat melaksanakan ajaran agamanya dan melakukan ibadahnya dengan baik. Selain itu, faktor kesamaan suku juga masih berpengaruh cukup besar dalam menentukan perilaku memilih masyarakat Kecamatan Permata. Sebab sebagian besar dari masyarakat juga memilih salah satu Paslon bupati dan wakil bupati dikarenakan kesamaan suku.¹⁶

Faktor tingkat pendidikan yang tinggi dari Paslon bupati dan wakil bupati mempunyai pengaruh yang paling besar dalam menentukan perilaku memilih masyarakat Kecamatan Permata. Selain itu, kesamaan keagamaan dan kesamaan suku, juga masih mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan perilaku memilih masyarakat Kecamatan Permata.

¹⁶ Ayub Umar, Mukim Gelumpang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 24 Juli 2018.

Ditemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata menyatakan bahwa memilih tidak dikarenakan alasan status sosial mereka sebab mereka merasa hanya sebagai rakyat kecil yang tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Masyarakat Kecamatan Permata banyak yang bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak dan pedagang. Sehingga, Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja. Selain itu, Masyarakat menggunakan hak pilihnya karena dari panggilan hati nurani dan kesadaran dari diri sendiri. Masyarakat sadar sebagai warga negara yang baik maka mereka harus memilih calon pemimpin untuk lima tahun ke depan.

Disisi lain terdapat sebagian kecil masyarakat Kecamatan Permata yang memilih dikarenakan status sosial mereka di masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada bertujuan supaya masyarakat juga ikut menggunakan hak pilihnya. Selain itu sebagian masyarakat yang memiliki jabatan tertentu merasa mempunyai tanggungjawab sebagai Reje Kampung (Geucik), Ketua PPS dan Ketua PPL, maka mereka harus memberikan contoh suri teladan sebagai seorang warga negara yang baik kepada masyarakat Kecamatan Permata dengan cara menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

4.2.2.2 Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Permata Pemilu Tahun 2017 Berdasarkan Pendekatan Psikologis

Hasil penelitian di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah menunjukkan bahwa terdapat fakta bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan

Permata memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati tidak dikarenakan mempunyai ideologi yang sama dengan salah satu partai politik yang mengusung Paslon bupati dan wakil bupati yang terpilih karena, masyarakat memilih karena sudah memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih wakil rakyat yang diinginkannya.

Selain itu, alasan masyarakat memilih juga karena melihat figur publiknya yang baik dari 7 calon bupati dan wakil bupati yang terdapat pada Pemilu pada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017. Sebab mereka merasa, di era sekarang mereka bebas memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati yang disukai serta bebas untuk memilih salah satu partai yang diinginkannya tanpa adanya pemaksaan seperti yang terjadi pada era orde baru, dimana rakyat dipaksa untuk memilih salah satu partai yang sesuai dengan keinginan penguasa/memilih salah satu ideologi dari partai politik yang berkuasa baik di parlemen maupun pemerintahan.¹⁷

Selain itu, juga ditemukan fakta lain yaitu sebagian kecil masyarakat Kecamatan Permata menggunakan hak pilihnya dikarenakan mereka merasa mempunyai ikatan emosional antara masyarakat dengan salah satu partai politik tertentu sebagai pengusung Paslon bupati dan wakil bupati yang menjadi kandidat dalam Pemilu pada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat masih melihat bahwa faktor ideologi yang dimiliki oleh partai politik pengusung pasangan calon tertentu tersebut sesuai dengan apa yang

¹⁷ Jonkenedi, Ketua Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

masyarakat inginkan yaitu partai politik yang peduli dengan rakyat kecil atau rakyat miskin.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta lain bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata menyatakan bahwa memilih salah satu Paslon bupati dan wakil bupati tidak dikarenakan calon yang mereka pilih itu, diusung oleh partai politik yang mereka sukai. Sebab mereka memilih bukan karena partai politiknya tetapi karena figur yang baik dari Paslon bupati dan wakil bupati yang sudah dipilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2017. Partai politik apapun kalau publik figur baik, maka masyarakat akan dipilih.¹⁸

Selain itu, masyarakat di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk memilih salah satu kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati juga karena melihat kedekatan hubungan atau kedekatan emosional yang baik antara Paslon bupati dan wakil bupati tersebut dengan masyarakat Kecamatan Permata pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Bener Meriah pada umumnya. Sebab dari beberapa Paslon bupati dan wakil bupati tersebut, pernah berkunjung ke Kecamatan Permata untuk meminta dukungan dan doa dari masyarakat Kecamatan Permata untuk memenangkan Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Selain itu, ditemukan fakta yang menunjukkan perilaku sebaliknya bahwa sebagian kecil masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah yang memilih salah satu Paslon bupati dan wakil bupati dikarenakan

¹⁸ Janibar, Masyarakat Pemilih/Petani Ladang, Warga Desa Pulo Tige, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

calon yang dipilih tersebut di usung oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik yang disukai. Dalam hal ini masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah mempunyai ekspektasi/harapan dengan partai tersebut agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat setelah terpilih atau keluar sebagai pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017. Selain masyarakat juga masyarakat merasa bahwa sepertinya partai tersebut terlihat lebih baik kinerjanya. Namun demikian masyarakat juga tidak terlalu yakin bahwa partai tersebut bisa konsisten untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata menyatakan bahwa memilih dikarenakan merasa mempunyai kedekatan emosional dengan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, dalam hal ini masyarakat merasa sudah mengenal sosok Paslon bupati dan wakil bupati yang sudah dipilih tersebut walaupun mereka tidak saling mengenal secara dekat.

Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Permata hanya sebatas tahu nama lengkap, pekerjaan, dan alamat rumah Paslon tersebut. Sebab kalau masyarakat Kecamatan Permata tidak mengenal Paslon yang akan dipilih, maka akan berbahaya sebab seperti membeli kucing dalam karung yang nantinya bisa menipu rakyat. Dalam arti, setelah terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bisa saja mereka nanti tidak bertanggungjawab dan tidak memperjuangkan nasib rakyat kecil. Sehingga, masyarakat Kecamatan Permata merasa perlu untuk mengenal mereka, melihat

¹⁹ Julian, Masyarakat Pemilih/Petani Ladang, Warga Desa Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 24 Juli 2018.

kepribadian mereka, dan mengetahui latar belakang pekerjaan para Paslon yang maju dalam PemiluKada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Fakta lain yang ditemukan adalah terdapat sebagian kecil masyarakat Kecamatan Permata yang menyatakan bahwa mereka memilih tidak dikarenakan mempunyai kedekatan emosional dengan salah satu pasangan Paslon bupati dan wakil bupati, dalam hal ini masyarakat tidak mengenal dengan dekat sosok pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah dipilih tersebut. Sebab masyarakat merasa belum mengenal dengan dekat sosok Paslon bupati dan wakil bupati yang sudah dipilih, masyarakat hanya sekedar mengetahui sedikit informasi tentang Paslon bupati dan wakil bupati tersebut dan itupun masyarakat mengetahuinya dari tim sukses calon bupati dan wakil bupati yang sudah dipilih dalam PemiluKada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

4.2.2.3 Perilaku Memilih Masyarakat Kecamatan Permata PemiluKada Tahun 2017 Berdasarkan Pendekatan Rasional

Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana perilaku memilih masyarakat Kecamatan Permata yang dilihat dari Pendekatan rasional. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Permata menyatakan bahwa memilih salah satu paslon bupati dan wakil bupati pada PemiluKada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 dikarenakan visi misi dan program-program unggulan yang ditawarkan oleh Paslon bupati dan wakil bupati, program-programnya dinilai menarik dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

Masyarakat memilih karena visi dan misi atau program kerja yang ditawarkan oleh Paslon bupati dan wakil bupati menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bener Meriah khususnya Kecamatan Permata. Dalam hal ini masyarakat berharap visi dan misi tersebut bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Permata khususnya dan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah pada umumnya supaya lebih sejahtera, lebih mandiri, dan lebih makmur. Tetapi, setelah dilakukan wawancara secara mendalam masyarakat Kecamatan Permata, mengetahui isi dari visi dan misi dari calon bupati dan wakil yang sudah dipilih. Namun tidak hafal seluruhnya, sebab mereka hanya hafal beberapa poin yang menurut mereka penting dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Permata.²⁰

Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan PPS Kecamatan Permata dan KIP Kabupaten Bener Meriah belum sepenuhnya berhasil, sehingga masih terdapat banyak masyarakat yang tidak tahu isi dari visi dan misi yang diusung oleh calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017. Meski demikian, masyarakat berharap agar visi dan misi Palon bupati dan wakil bupati terpilih agar bisa diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Permata terutama dapat mendongkrak pada sector pertanian dan perkebunan di wilayah itu. Ditemukan juga fakta lain bahwa ada sebagian kecil masyarakat Kecamatan Permata yang menyatakan bahwa mereka memilih bukan dikarenakan visi misi dan program-

²⁰ Hasan Basri, Masyarakat Pemilih/Petani Kebun, Warga Desa Buntul Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 25 Juli 2018.

program yang ditawarkan oleh Paslon bupati dan wakil bupati yang maju dalam Pemilu di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017. Dalam hal ini masyarakat memilih karena kesadaran dari diri sendiri bahwa sudah waktunya memilih maka mereka menggunakan hak pilihnya dan mereka memilih karena kemantapan hati mereka untuk memilih salah satu Paslon bupati dan wakil bupati yang diinginkannya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa masyarakat Kecamatan Permata menyatakan bahwa mereka memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilu di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 dikarenakan kepribadian atau figur dari kandidat yang dicalonkan. Masyarakat memilih salah satu Paslon bupati dan wakil bupati karena kepribadian atau figurnya yang baik, hal tersebut sangat penting. Jika kepribadian Paslon baik maka masyarakat akan mencontohnya karena masyarakat membutuhkan seorang figur pemimpin yang baik. Selain itu, jika kepribadiannya baik, diharapkan bupati dan wakil bupati yang terpilih bisa melaksanakan kinerjanya secara bertanggungjawab dan amanah terhadap rakyatnya serta memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyatnya. Masyarakat Kecamatan Permata juga berharap agar bupati dan wakil bupati yang terpilih tersebut, tidak melupakan visi dan misinya serta tidak melanggar janji-janji yang telah diucapkan kepada masyarakat saat kampanye dalam Pemilu di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.²¹

Secara umum masyarakat Kecamatan Permata juga merasa bahwa mereka memilih karena sudah memiliki kesadaran dari diri mereka sebagai warga negara

²¹ Ayub Umar, Mukim Gelumpang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Wawancara, Tanggal 24 Juli 2018.

yang baik untuk menggunakan hak pilihnya bukan karena imbalan atau hibah atau hadiah berupa uang atau bukan karena keuntungan jangka pendek. Sebab hal itu bisa saja menyebabkan terjadinya korupsi setelah paslon bupati dan wakil bupati tersebut menjabat menjadi bupati dan wakil bupati yang terpilih untuk memimpin di Kabupaten Bener Meriah lima tahun ke depan dan dikarenakan uang. Masyarakat pemilih rasional ini memang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik yaitu lulusan SMA, Diploma, sarjana dan pasca sarjana. Mereka juga mempunyai pengetahuan politik yang lebih baik sebab mereka sering mengikuti dan melihat perkembangan berita politik yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah dan berita politik nasional.

4.3 Pembahasan

Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Kabupaten Bener Meriah merupakan yang menggelar pemilukada serentak dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernur tahun 2017. Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah di ikuti oleh 7 Pasangan Calon (Paslon) dengan jumlah pemilih 96.727 orang yang terdiri dari 48.269

pemilih laki-laki dan 48.456 pemilih perempuan. Hasil Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah diungguli oleh Paslon nomor urut 3 yaitu Ahmadi, SE dan Tgk. H. Sarkawi yang meraup 29.554 suara (37.88%) yang mengalahkan 6 Paslon lainnya. Sementara tingkat partisipasi masyarakat pemilih khususnya di Kecamatan Permata mencapai 81.3% dengan rincian yaitu sebanyak 11.410 orang yang terdiri dari 6.605 pemilih laki-kali dan 4.805 pemilih perempuan dengan jumlah suara sah sebanyak 9.495suara dan suara yang tidak sah sebanyak386 suara, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih (golput) sebanyak 1.578 orang.

Angka statistik tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih melebihi ekspektasi KIP Bener Meriah yaitu sebesar 75 persen. Dalam budaya politik dimasyarakat tentu terdapat partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Salah satu contoh partisipasi aktif masyarakat adalah mentaati peraturan pemerintah dengan cara menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada. Seperti halnya pada masyarakat Kecamatan Permata yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari perilaku memilih masyarakat. Perilaku memilih masyarakat pada dasarnya saling berkaitan antara budaya politik yang ada di masyarakat, karena perilaku memilih merupakan sikap masyarakat untuk memberikan suara dan menentukan calon siapa yang akan dipilih menjadi bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada. Sehingga, budaya politik yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi perilaku memilihnya. Oleh karena itu, adanya perilaku memilih masyarakat

dalam pemilukada merupakan salah satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

Masyarakat Kecamatan Permata menggunakan hak pilihnya karena masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Melalui keikutsertaan dalam Pemilukada, berarti masyarakat turut serta membantu pemerintah untuk mengubah negeri ini menjadi lebih baik. Masyarakat juga menggunakan hak pilihnya untuk menyalurkan aspirasinya karena kesadarannya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi atau pendapat untuk memilih bupati dan wakil bupati yang mereka inginkan dengan cara mengikuti Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Permata merupakan masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kecamatan Permata memiliki keikutsertaan atau kepedulian terhadap negara dan daerahnya untuk ikut serta mengubah daerah dan negaranya ini supaya menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan oleh mereka dengan cara mengikuti atau menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

Namun demikian sebagian masyarakat menunjukkan sikap yang baik dan patut untuk ditiru oleh semua elemen masyarakat lain yaitu yang menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya kesadaran secara murni dari diri mereka untuk memilih calon bupati dan wakil bupati tanpa adanya embel-embel uang atau hibah berupa uang dari tim sukses para kandidat Paslon. Mereka menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya harapan supaya mereka mempunyai seorang bupati

dan wakil bupati yang berkualitas, bertanggungjawab, amanah, peduli dengan kepentingan rakyat, jujur, dan tidak korupsi. Selain itu, mereka juga menginginkan adanya perubahan yang lebih baik serta adanya kemajuan untuk Kabupaten Bener Meriah selama lima tahun mendatang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Budaya politik yang ada pada masyarakat kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilihan tahun 2017 mempunyai ciri budaya politik partisipan dengan menunjukkan partisipasi politik yang tinggi. Alasan masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan tahun 2017 adalah sebagian besar karena faktor kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Orientasi budaya politik yang terdapat di Kecamatan Permata secara umum berdasarkan orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif.
2. Perilaku memilih pada masyarakat kecamatan Permata dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu aspek sosiologis, psikologis dan rasional. Perilaku memilih dari aspek sosiologis dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat memilih kandidat Paslon berdasarkan pendidikan, keagamaan dan kesukuan. Dari aspek psikologis yaitu masyarakat masih tergiring oleh politik pencitraan, loyalitas dan faktor kedekatan emosional dengan partai politik atau Paslon. Dari aspek rasional yaitu memilih mempertimbangkan visi dan misi para calon, kampanye, komitmen, prestasi, integritas dan kepribadian Paslon.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis kepada berbagai pihak dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada KIP, PPK dan PPS dan Partai Politik di Kabupaten Bener Meriah diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam mensosialisasikan nilai-nilai politik serta mengupayakan pendidikan politik agar masyarakat pemilih menjadi cerdas, kritis, serta rasional dan bukan memilih karena mereka mendapatkan imbalan berupa uang dan sebagainya.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah perlu melakukan pemberdayaan politik bagi masyarakat yang bekerjasama dengan KIP, PPK, PPS dan Partai Politik di Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan pendidikan politik baik menjelang pemilu maupun dalam mengawal, mengkontrol, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.
3. Kepada Panwaslu, Camat, Mukim, Geucik, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkompeten diharapkan dapat ikut serta mengawasi mengkontrol, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh kandidat yang terpilih dalam Pemilihan di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ronaldh H. Chilcote, *TeoriPerbandinganPolitik*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2007.
- A. Rahman H.I, *SistemPolitik Indonesia*, Yogyakarta: GrahaIlmu, 2007.
- Coen HusainPontoh, *Gerakan Massa MenghadangImperealisme Global*, Yogyakarta: Resist Book, 2005.
- CholisindanNasiwan, *Dasar-DasarIlmuPolitik*, Yogyakarta: PenerbitOmbak, 2012.
- David Marsh & Gerry Stoker, *TeoridanMetodedalamIlmuPolitik*, Bandung : Nusa Media, 2010.
- Daniel S. Salossa, *Mekanisme, PersyaratandanTataCaraPemilukadaLansung*, Yogyakarta: Media Presindo, 2005.
- Firmanzah, *Marketing PolitikAntaraPemahamanandanRealitas*, Jakarta: YayasanObor Indonesia, 2008.
- LiliRomli, *PotretOtonmi Daerah danWakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007.
- Lexy J. Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2010.
- HarisHerdiansyah, *MetodologiPenelitianKualitatif: UntukIlmu-IlmuSosial*, Jakarta: SalembaHumanika, 2012.
- Prihatmoko, Joko J, *PemilihanKepala Daerah langsung*, Semarang: PustakaPelajar, 2005.
- RamlanSurbakti, *MemahamiIlmuPolitik*, Jakarta: GramediaWidiasarana Indonesia, 2010.
- RusadiKantaprawira, *SistemPolitik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: SinarBaruAlgensindo, 2006.
- Rush Althoff, *PengantarSosiologiPolitik*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Sugiyono, *MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitian (SuatuPendekatanPraktis)*, Jakarta: Alfabeta, 2011.

B. Skripsi/Jurnal

EkoPuspita Sari, *Pengaruh Pelembagaan Partai Golkar Yogyakarta Terhadap Pola Perilaku Memilih Dalam Pemilu Legislatif 2009*, Skripsi. UNY, 2011.

Septi Meliana, *Budaya Politik dan Partisipasi Politik (Suatu studi: Budaya Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat Di Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Desa Aek Tuhul Kecamatan Batunadua Padang Sidempuan)*, Jurnal Medan: USU, 2011).

C. Online/Peraturan Perundang-Undangan

https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/bener_meriah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pasal 2 ayat 1-4 dan pasal 3 ayat 1-3.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 166/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2018
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRI BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan.
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 22 Januari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Drs. Muslim Zainuddin, M.Si sebagai pembimbing pertama
2. Eka Januar, M.Soc.Sc sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi
Nama : Muslim
NIM : 140801001
Prodi : Ilmu Politik
Judul : Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Kepala daerah tahun 2017
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut hanya dapat dibayar kepada Dosen Luar Biasa yang di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:
g. Pembimbing pertama Rp. 250.000/ mahasiswa
h. Pembimbing kedua Rp. 200.000/ mahasiswa
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2018/2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Februari 2018

An. Rektor
Dekan,



Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi ILMU POLITIK FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PERMATA
KAMPUNG GELAMPANG WIH TENANG UKEN

Nomor : 1087/SR/06/2018
Lampiran : -
Prihal : Rekomendasi Penelitian hasil wawancara

GWT Uken, 25 Juli 2018
Kepada Yth
Bapak Dekan I Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamualaikum, wr. wb
Dengan hormat

1. Berdasarkan surat wakil dekan I universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B- 1104/Un.08/FISP.1/PP.09/07/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal permohonan izin Penelitian.
2. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Reje Kampung Gelampang Wih Tenang Uken dengan ini Merekomendasikan.
Nama : Muslim
Nim : 140801001
Jurusan : Progeram study ilmu politik fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Pemeritahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
Judul : Budaya Politik masyarakat Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Permata dalam Pemilihan Kepala daerah Tahun 2017.
3. Bahwasannya nama tersebut diatas telah melaksanakan wawancara dengan Reje kampung Gelampang Wih Tenang Uken.
4. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya di ucapakan terima kasi.

Wassalamualaikum, wr. wb

GWT Uken, 25 Juli 2018
/ Reje kampung





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1108/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/07/2018

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Masyarakat Desa
di

Kecamatan Permata Bener Meriah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami dalam rangka wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna selesainya tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Muslim
NIM : 140801001
Jurusan : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Budaya Politik Masyarakat Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Permata Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan I,



PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT

Identitas Responden/Informan

Nama Responden :
Jenis Kelamin :
Usia Responden :
Jabatan Responden :
Alamat Responden :
Jumlah Memilih :
Tanggal Wawancara :

Petunjuk Wawancara

1. Ucapan terimakasih kepada responden/informan atas kesediaannya diwawancarai.
2. Perkenalkan diri & jelaskan kepada responden/informan tentang tujuan wawancara.
3. Jelaskan bahwa responden/informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan, atau saran yang berkaitan dengan topik wawancara.
4. Catat dan rekam seluruh pembicaraan saat proses wawancara berlangsung.

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr menggunakan hak pilih anda pada pemilukada Kabupaten Bener Meriah tahun 2017?
2. Mengapa Bapak/Ibu/Sdr menggunakan hak pilih anda pada pemilukada Kabupaten Bener Meriah tahun 2017?
3. Mengapa Bapak/Ibu/Sdr memilih salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai tersebut?
4. Calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai apa yang ada pilih pada pemilukada Kabupaten Bener Meriah tahun 2017?
5. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi Bapak/Ibu/Sdr untuk memilih salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati?
6. Apakah ketika Bapak/Ibu/Sdr memilih salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati itu dikarenakan anda mendapatkan imbalan berupa uang, kaos, kebutuhan pokok dan sebagainya?
7. Apakah Bapak/Ibu/Sdr percaya bahwa dengan mengikuti pemilukada Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik?
8. Bagaimana perasaan ketika Bapak/Ibu/Sdr sudah mengikuti pemilukada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati?
9. Apakah di kampung Bapak/Ibu/Sdr terdapat tim sukses dari salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati yang membagi-bagikan imbalan berupa uang, kaos, kebutuhan pokok dan sebagainya?

DAFTAR GAMBAR



GAMBAR 11-1. Muhtarudin M.Ba. Ketua KIP kab. Bener Meriah, Kec. Permata.



GAMBAR 11-2. Surahman S.Pdi, Anggota Panwaslu Kec. Permata



GAMBAR 11-3. Jonkenedi, ketua pengawas pemilu lapangan. Kec. permata



GAMBAR 11-4. Sabarudin SE Ketua Camat, kec. Permata.



GAMBAR 11-5. Almahdi Reje Kampung ampung Gelampang Wih Tenang Uken. Kec. Permata



GAMBAR 11-6. Ayub Umar, Mukim kampung Gelampang Wig Tenang Uken Kec. Permata.



GAMBAR 11-7. Hasan basri. Masyarakat kampung buntut kemumu, kec. Permata



GAMBAR 11-8. Fatma Wati, Masyarakat kampung Bale Permata, kec. Permata.



GAMBAR 11-9. Janibar, masyarakat kampung Pulo Tige, kec. Permata.



GAMBAR 11-10. Hasbullah, masyarakat kampung Tumur Jaya, kec. Permata.



GAMBAR 11-11. Julia, masyarakat kampung bintang, kec. Permata.

BIODATA PENULIS

Identifikasi Diri:

Nama : Muslim
Tempat/ Tgl. Lahir : Putribetung, 01 Januari 1996
Jenisklamin : Laki-Laki
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa / 140801001
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Fakultas/ jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan / Prodi Ilmu Politik
IPK Terakhir : -
Judul Skripsi : Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017.
Alamat Sekarang : jl.Belangkejeren Kutacane, Gumpang Lempuh, Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, Aceh

No, Hp : 082165643703

Data orang tua :

Nama ayah : Julkarnain
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Marinem
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat pendidikan :

- a. SD/Sederajat : SDN 1 Putri Betung : 2003-2008
- b. SMP/Sederajat: SMPN 1 Putri Betung : 2008-2011
- c. SMKN 1 Blangkejeren : 2011-2014
- d. Akademi S-1 : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan : 2014-2018.